

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Ryan Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Email : ryanmaulana96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) hukum kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia kepada anak-anak menurut hukum pidana Indonesia sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman, yaitu: sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Penetapan Sanksi kebiri yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberi efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Pihak kontra atas pelaksanaan sanksi kebiri kimia umumnya berargumentasi bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM juga berpotensi konflik dengan Kode Etik Profesi Kedokteran; dan 2) saat ini kebiri telah menjadi produk undang-undang yang baru, tentunya dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan kebijakan dengan pembentukan, kebijakan penegakan, kebijakan pelaksanaan. sementara penulisan penelitian ini hanya terbatas pada kajian kebijakan keberadaan pembentukan undang-undang semata.

Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain: 1) the basis for the formation of castration sanctions on perpetrators of sexual violence against children; and 2) the existence of castration sanctions in criminal law policies. This research is included in the type of normative/doctrinal legal research, namely the type of research using a statute approach, legal principles and doctrines as the study. The object of this research is the law which is conceptualized as what is written in the laws and regulations made by the authorized institution, in the form of a law concerning the protection of children from the crime of sexual violence (pedophilia). The specification of this research is analytical descriptive, which is to describe the castration punishment for perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) based on the Child Protection Act.

The results of the study show that 1) the law of chemical castration against perpetrators of criminal acts of pedophilia to children according to Indonesian criminal law already includes elements contained in a punishment, namely: as an effort to retaliate (revenge) for violating the law and the provisions stipulated in the law, already created or defined. The stipulation of castration sanctions implemented in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection aims to protect the benefit of the Indonesian people from pedophile perpetrators and provide a deterrent effect to perpetrators as well as a form of legal responsibility for pedophile criminals. The contra on the implementation of chemical castration sanctions generally argue that it is contrary to human rights principles and has the potential to conflict with the Code of Ethics for the Medical Profession; and 2) currently castration has become a product of a new law, of course in criminal law policy it is known as policy with formation, enforcement policy, implementation policy. while the writing of this research is only limited to the study of policies on the existence of the formation of laws.

Keywords: castration, sexual violence and child protection laws